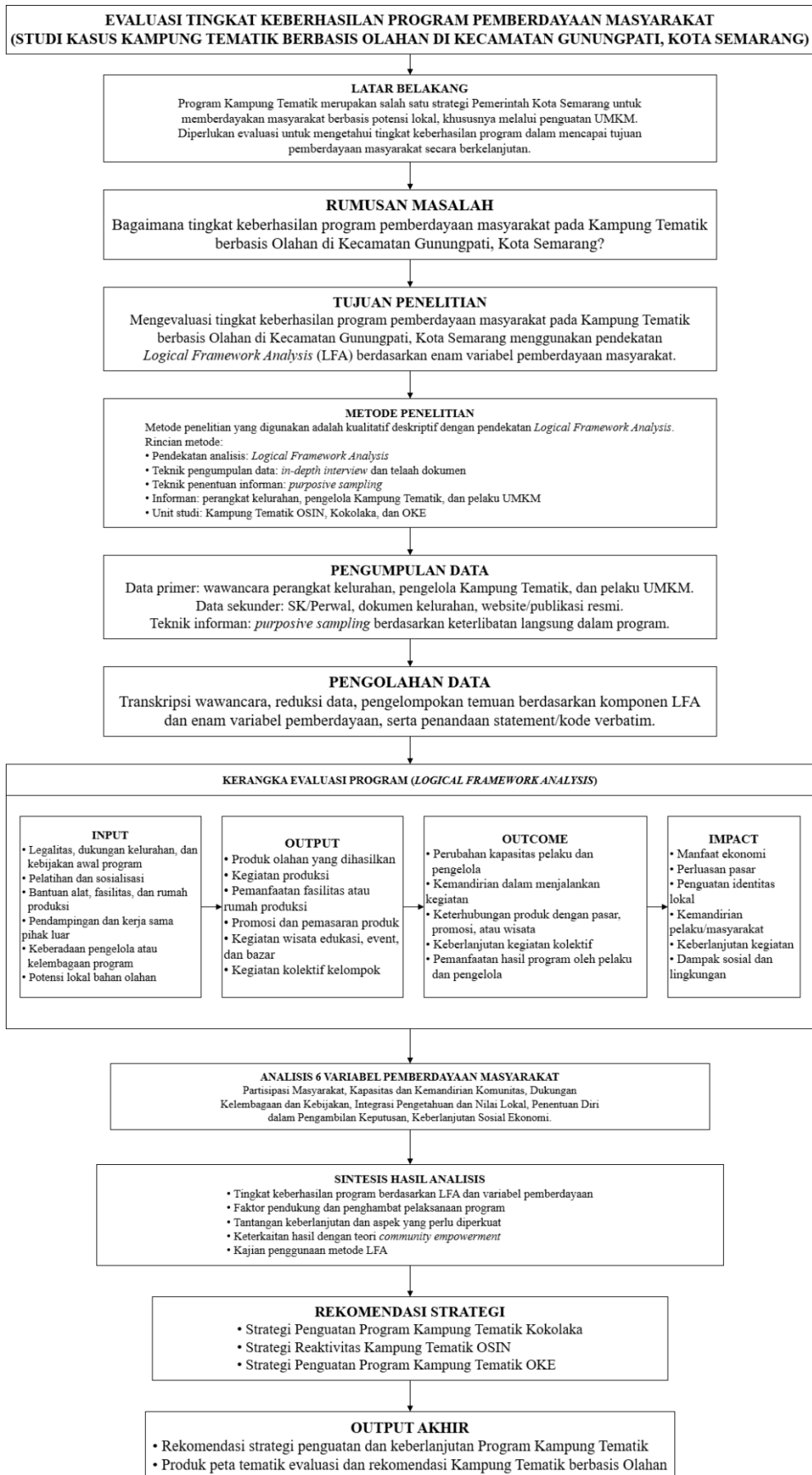


## **BAB 2**

### **KONSEP PERENCANAAN**

Kerangka konsep perencanaan merupakan bagian dari konsep perencanaan yang digunakan untuk memberikan gambaran alur penelitian secara sistematis. Kerangka ini disusun untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami keterkaitan antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, proses pengumpulan data, analisis, hingga hasil akhir tugas akhir. Berikut merupakan bagan konsep perencanaan pada tugas akhir ini.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Perencanaan**

Sumber: Penyusun, 2026

## 2.1 Kajian Literatur

### 2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

#### 2.1.1.1 Definisi dan Dasar Konsep

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap paradigma pembangunan *top down* yang cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan (Craig & Mayo, 1995). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan menekankan peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya lokal (Koh et al., 2019). Konsep ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal masyarakat.

Secara konseptual, dasar teori pemberdayaan pertama kali dikemukakan oleh A. Rappaport et al., (1987) yang memandang *empowerment* sebagai proses sosial di mana individu dan komunitas memperoleh kontrol terhadap kehidupannya melalui partisipasi dan kolaborasi dalam konteks sosial. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh Fetterman (2018) melalui konsep *empowerment evaluation*, yang menekankan pentingnya kepemilikan komunitas (*community ownership*) dan refleksi kolektif dalam setiap tahap pembangunan. Kedua pandangan tersebut menjadi fondasi teoritis bagi pendekatan pemberdayaan masyarakat modern yang menempatkan warga sebagai subjek utama pembangunan.

Menurut Fetterman (1994) pemberdayaan merupakan proses yang menumbuhkan kemampuan individu dan kelompok untuk mengevaluasi, memahami, serta mengarahkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Empowerment Evaluation*, yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai evaluator terhadap proses yang mereka jalankan. Menurut Perkins & Zimmerman (1995) memperluas konsep ini melalui *Empowerment Theory* yang menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama: *intrapersonal empowerment*, *interactional empowerment*, dan *behavioral empowerment*. Ketiga dimensi tersebut memperkuat posisi masyarakat sebagai agen perubahan dalam sistem sosialnya.

Menurut M. Conlin (2024) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat yang efektif harus bersifat partisipatif, reflektif, dan berorientasi pada pembelajaran sosial. Dalam konteks pembangunan komunitas, pemberdayaan berfungsi sebagai alat untuk

memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, serta menciptakan sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil material, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas kolektif masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses sosial yang mendorong transformasi menuju kemandirian komunitas. Pandangan ini memperkuat dimensi partisipatif dari teori pemberdayaan yang sebelumnya dikembangkan oleh (Perkins & Zimmerman, 1995)

Menurut Lipinski et al., (2025) menjelaskan bahwa model kerangka logis seperti pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) efektif digunakan untuk menilai sejauh mana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung secara sistematis. LFA digunakan untuk memetakan hubungan logis antar komponen program dan memastikan bahwa setiap indikator keberhasilan dapat dinilai secara terukur. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, LFA tidak hanya berfungsi untuk menilai capaian program, tetapi juga membantu memahami bagaimana proses pemberdayaan berlangsung dalam komunitas. Oleh karena itu, LFA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi teknis, tetapi juga sebagai kerangka partisipatif yang mendukung proses pemberdayaan secara menyeluruh. Dengan demikian, LFA memberikan kerangka logis yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya lokal secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemberdayaan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi sosial yang melibatkan kolaborasi multiaktor dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut menjadi dasar bagi penerapan pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) untuk menilai sejauh mana prinsip pemberdayaan masyarakat diterapkan pada Program Kampung Tematik berbasis Olahan di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap efektivitas program pemberdayaan berbasis komunitas.

#### **2.1.1.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pemberdayaan masyarakat tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan yang bersifat sistematis dan berorientasi pada kemandirian komunitas. Menurut Rappaport et al. (1987), pemberdayaan merupakan proses sosial yang membantu individu dan kelompok memperoleh kontrol terhadap keputusan yang memengaruhi

kehidupannya. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Kieffer (1984) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan berkembang melalui serangkaian fase pembelajaran dan tindakan kolektif, di mana masyarakat bertransformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Perkins & Zimmerman (1995) memperluas konsep tersebut melalui *Empowerment Theory* yang menempatkan pemberdayaan sebagai proses multidimensi yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan organisasi. Dalam konteks implementasi program, Fetterman (1994) memperkenalkan pendekatan *Empowerment Evaluation* yang menjadikan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga evaluator dalam setiap tahap kegiatan. Berdasarkan sintesis teori-teori tersebut, tahapan pemberdayaan masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Engagement*. Tahapan ini menekankan pentingnya membangun hubungan antara fasilitator dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran kritis tentang kebutuhan dan potensi lokal (Freire, 1970).
2. *Assessment*. Masyarakat bersama fasilitator mengidentifikasi isu, sumber daya, serta hambatan sosial yang dihadapi secara partisipatif (Kieffer, 1984).
3. *Planning*. Pada tahap ini, masyarakat terlibat dalam menyusun strategi dan merancang kegiatan yang mencerminkan kepemilikan bersama terhadap tujuan pembangunan (Perkins & Zimmerman, 1995).
4. *Implementation*. Pelaksanaan dilakukan melalui kolaborasi antara masyarakat dan pendamping. Prinsip utama pada tahap ini adalah *learning by doing* dan gotong royong dalam mengelola sumber daya lokal (Fetterman, 1994).
5. *Evaluation*. Evaluasi berfungsi untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi pelajaran dari proses pemberdayaan. Evaluasi dilakukan secara partisipatif agar masyarakat belajar menilai dan memperbaiki program secara mandiri (Fetterman, 2001).
6. *Disengagement*. Pada tahap akhir, fasilitator menarik diri secara bertahap setelah masyarakat dinilai mampu mengelola kegiatan secara mandiri. Ini menandakan bahwa proses pemberdayaan telah mencapai keberdayaan kolektif (Craig & Mayo, 1995).

Dengan demikian, proses pemberdayaan masyarakat bersifat siklikal, reflektif, dan berkelanjutan, di mana setiap tahap saling memperkuat dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, adaptif, dan berdaya secara sosial maupun ekonomi (Zimmerman, 2000).

### **2.1.1.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip pemberdayaan masyarakat berakar pada pemikiran Freire (1970) yang menekankan kesetaraan (*equity*) dan kesadaran kritis (*critical consciousness*) sebagai dasar

utama perubahan sosial. Dalam pandangan Freire, hubungan antara fasilitator dan masyarakat harus bersifat dialogis dan setara, di mana setiap individu diakui sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga. Kesetaraan ini menciptakan ruang reflektif untuk membangun solidaritas sosial serta meningkatkan kepercayaan antaraktor dalam komunitas. Sejalan dengan itu, Sen (1999) menegaskan bahwa kesetaraan merupakan inti dari pemberdayaan karena pembangunan sejati terjadi ketika individu memiliki kebebasan dan kemampuan (*capability*) untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, prinsip kesetaraan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang berdaya dan otonom dalam proses pembangunan.

Prinsip kedua adalah partisipasi, yang menjadi inti dari pendekatan *empowering community* sebagaimana dikemukakan oleh Rappaport et al. (1987) dan diperkuat oleh Craig & Mayo (Craig & Mayo, 1995). Partisipasi bukan sekadar keterlibatan fisik, melainkan keterlibatan kognitif dan emosional masyarakat dalam setiap tahap program pembangunan. Perkins & Zimmerman (1995) menjelaskan bahwa partisipasi aktif mencerminkan tingkat *interactional empowerment*, yaitu kemampuan masyarakat untuk memahami dan memengaruhi sistem sosial yang mereka hadapi. Chambers, (1994) menambahkan bahwa melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, masyarakat berperan sebagai produsen pengetahuan lokal yang mampu merumuskan solusi sesuai konteks wilayahnya. Dengan demikian, partisipasi menjadi sarana penting untuk memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap hasil pembangunan.

Prinsip ketiga adalah kemandirian dan keswadayaan, yang menekankan pentingnya kapasitas internal masyarakat dalam mengelola kehidupannya. Menurut Fetterman (1994) pemberdayaan sejati dicapai ketika masyarakat memiliki kemampuan reflektif dan evaluatif untuk menilai serta memperbaiki tindakannya secara mandiri. Proses ini memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi lokal, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Kabeer (1999) memperkuat pandangan ini dengan menjelaskan bahwa kemandirian muncul dari interaksi antara tiga dimensi utama pemberdayaan sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), dan capaian (*achievements*) yang secara sinergis membentuk kemampuan masyarakat dalam menentukan arah hidupnya. Dengan demikian, kemandirian dan keswadayaan menjadi indikator penting keberhasilan program pemberdayaan.

Prinsip terakhir adalah keberlanjutan (*sustainability*), yang menekankan kesinambungan proses dan dampak pemberdayaan masyarakat. Narayan (2004) menjelaskan bahwa keberlanjutan terjadi ketika nilai-nilai partisipatif dan kapasitas

kelembagaan telah melembaga dalam struktur sosial masyarakat. Putnam et al., (1994) menambahkan bahwa keberlanjutan sosial dibangun melalui kekuatan modal sosial (*social capital*) berupa kepercayaan, jaringan, dan norma kerja sama antarwarga yang menjaga stabilitas komunitas. Rowlands (1997) juga menegaskan bahwa keberlanjutan pemberdayaan memerlukan transformasi relasi kekuasaan agar individu dan komunitas memiliki posisi tawar yang setara dalam struktur sosial. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan tidak hanya menjamin kelanjutan program secara teknis, tetapi juga memastikan terpeliharanya nilai-nilai kemandirian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang.

### 2.1.2 Evaluasi program pemberdayaan

Evaluasi merupakan komponen penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena berfungsi menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Weiss (1998) yang mendefinisikan evaluasi sebagai proses penerapan metode ilmiah untuk menilai efektivitas program sosial berdasarkan teori yang mendasarinya (*theory based evaluation*). Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran hasil, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran yang membantu pelaksana program memahami apa yang berhasil, apa yang tidak, dan mengapa hal tersebut terjadi.

Konteks pemberdayaan masyarakat, evaluasi memiliki peran yang lebih reflektif dan partisipatif. Fetterman (1994) memperkenalkan konsep *Empowerment Evaluation*, yaitu pendekatan evaluasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses penilaian, bukan sekadar objek yang dievaluasi. Melalui partisipasi aktif masyarakat, evaluasi menjadi alat untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam menilai, mengelola, dan memperbaiki program secara mandiri. Patton (1997) menambahkan bahwa evaluasi yang berorientasi pada pemanfaatan (*utilization focused evaluation*) dapat meningkatkan efektivitas program karena hasilnya langsung digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan strategi pemberdayaan.

Chambers (1994) menekankan bahwa keberhasilan evaluasi program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengkajian dan refleksi. Evaluasi partisipatif memungkinkan munculnya *local ownership* (rasa memiliki) terhadap proses dan hasil program yang menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan pemberdayaan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Rossi et al. (2003) yang menegaskan bahwa evaluasi program sosial seharusnya mencakup analisis proses (*process evaluation*) dan dampak (*impact evaluation*) agar dapat menangkap dinamika perubahan sosial secara

lebih komprehensif. Dengan demikian, evaluasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat berfungsi ganda sebagai alat ukur keberhasilan sekaligus sarana pembelajaran kolektif untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian komunitas.

Dalam praktik modern, Pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) menjadi kerangka yang banyak digunakan untuk merancang dan mengevaluasi program pemberdayaan. Menurut Ortiz-marcos (2022), LFA efektif dalam memetakan keterkaitan logis antara tujuan, kegiatan, hasil, dan dampak program sosial. Meskipun beberapa ahli seperti Patton (2014) mengkritik sifat LFA yang terlalu linier dan kaku, pendekatan ini tetap relevan bila dipadukan dengan prinsip evaluasi partisipatif dan indikator kualitatif. Oleh karena itu, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, LFA perlu diperkaya dengan dimensi sosial seperti partisipasi, kapasitas, dan kemandirian agar mampu menangkap aspek transformasional dari proses pemberdayaan. Mengintegrasikan pendekatan rasional LFA dan prinsip reflektif dari *Empowerment Evaluation*, evaluasi program dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga memperkuat proses belajar sosial dan keberlanjutan masyarakat.

#### **2.1.2.1 Logical Framework Analysis**

*Logical Framework Analysis* (LFA) merupakan pendekatan perencanaan dan evaluasi program yang digunakan secara luas dalam pembangunan internasional dan program sosial. LFA pertama kali dikembangkan oleh *United States Agency for International Development* (USAID) pada akhir 1960-an sebagai alat untuk meningkatkan konsistensi logis antara tujuan, kegiatan, dan hasil program pembangunan (Conlin et al., 2000). Seiring perkembangannya, LFA diadopsi oleh berbagai lembaga internasional seperti World Bank, *United Nations Development Programme* (UNDP), dan *European Commission* sebagai kerangka standar dalam perencanaan, pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi program pembangunan berbasis hasil (Commission, 2004; World Bank, 2005)

Dalam konteks manajemen berbasis hasil (*results-based management*), LFA menekankan pentingnya perumusan tujuan yang berorientasi pada perubahan (*outcome* dan *impact*), bukan sekadar pada pelaksanaan kegiatan. UNDP menegaskan bahwa LFA mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terintegrasi, sehingga memungkinkan pengelola program untuk menilai sejauh mana intervensi benar-benar menghasilkan perubahan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat (Programme, 2009).

LFA berfungsi sebagai alat analitis dan manajerial yang menyajikan kerangka logis suatu program dalam bentuk matriks yang sistematis, yang mencakup hierarki tujuan,

indikator kinerja, sumber verifikasi, serta asumsi dan risiko utama. Pendekatan ini membantu perencana dan pengambil keputusan untuk menguji konsistensi logika program, memastikan keterukuran hasil, serta meningkatkan akuntabilitas terhadap capaian pembangunan (World Bank, 2005).

Struktur utama LFA disusun dalam suatu hierarki logis yang terdiri atas tujuan jangka panjang (*goal*), tujuan khusus atau tujuan proyek (*purpose*), keluaran (*outputs*), serta kegiatan (*activities*). Hubungan antar level tersebut didasarkan pada logika kausal “jika–maka” (*if–then logic*), yang menyatakan bahwa pencapaian kegiatan akan menghasilkan keluaran, keluaran akan berkontribusi pada pencapaian tujuan, dan tujuan akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih luas, dengan catatan asumsi eksternal tetap terpenuhi (*United States Agency for International Development*, 2012).

Selain sebagai alat perencanaan, LFA juga berperan penting dalam pemantauan dan evaluasi program. Setiap tingkat dalam hierarki tujuan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan sumber verifikasi yang jelas, sehingga memudahkan penilaian kemajuan dan efektivitas program secara objektif. World Bank menekankan bahwa kejelasan indikator dan asumsi dalam LFA menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti (World Bank, 2005).

Pendekatan LFA juga menempatkan analisis risiko dan asumsi sebagai elemen kunci dalam desain program. Uni Eropa melalui pedoman *Project Cycle Management* menyatakan bahwa kegagalan banyak proyek pembangunan sering kali disebabkan oleh asumsi yang tidak diuji secara kritis sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, LFA mendorong identifikasi dini terhadap faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung proyek namun berpotensi memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan (Commission, 2004).

Dengan demikian, *Logical Framework Analysis* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi juga sebagai alat berpikir strategis yang membantu memastikan koherensi antara permasalahan, tujuan, intervensi, dan hasil pembangunan. Penerapan LFA secara konsisten memungkinkan program pembangunan dirancang secara lebih sistematis, terukur, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata yang berkelanjutan. *Logical Framework Analysis* (LFA) memiliki keunggulan sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang sistematis, metode ini juga memiliki keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Kelebihan utama LFA terletak pada kemampuannya menyusun hubungan sebab akibat secara logis antara permasalahan, tujuan, keluaran, dan kegiatan, sehingga memudahkan proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis

hasil. Selain itu, struktur matriks LFA membantu meningkatkan kejelasan indikator kinerja, asumsi, serta risiko, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dan transparansi program pembangunan. Namun demikian, LFA juga memiliki kelemahan, terutama kecenderungannya untuk menyederhanakan realitas sosial yang kompleks ke dalam kerangka logis yang linear. Jika tidak didukung oleh analisis kontekstual yang memadai, LFA berpotensi mengabaikan dinamika sosial, perubahan eksternal, serta faktor informal yang sulit diukur secara langsung. Oleh karena itu, penerapan LFA dalam penelitian ini dilakukan secara hati-hati dengan mengombinasikan analisis kualitatif dan proses validasi, sehingga kelebihan metode dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan keterbatasannya.

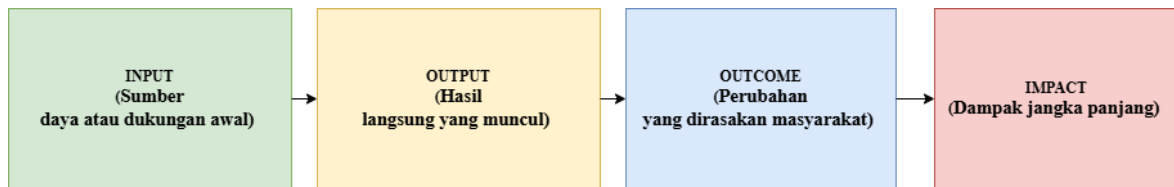
#### **2.1.2.2 Fungsi Evaluasi Program**

Evaluasi memiliki fungsi utama sebagai alat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu program dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rossi et al., (2003) evaluasi berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk menilai sejauh mana intervensi sosial menghasilkan perubahan yang diharapkan melalui pengukuran konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Patton (1997) menambahkan bahwa evaluasi juga berperan sebagai sarana *organizational learning* membantu pelaksana program memahami apa yang berhasil, apa yang tidak, dan mengapa hal itu terjadi, sehingga proses pembangunan dapat lebih adaptif.

Scriven (1991) membedakan fungsi evaluasi menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif, fungsi formatif digunakan selama pelaksanaan untuk memperbaiki proses, sedangkan fungsi sumatif menilai hasil dan dampak setelah program selesai. Pemberdayaan masyarakat, Fetterman (1994) menegaskan bahwa evaluasi bukan hanya alat ukur kinerja, tetapi juga proses reflektif yang memperkuat kapasitas komunitas dalam menilai dan mengarahkan perubahan sosialnya sendiri. Dengan demikian, evaluasi berfungsi ganda sebagai alat pengendalian program sekaligus sarana pemberdayaan yang mendorong partisipasi dan pembelajaran kolektif masyarakat.

#### **2.1.2.3 Kerangka Evaluasi Program dalam Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kerangka *Logical Framework Analysis* secara adaptif dengan pendekatan *logic model/results chain*. Kerangka ini digunakan karena penelitian tidak hanya menilai keberadaan program, tetapi juga membaca keterhubungan antara dukungan awal, proses pelaksanaan, hasil langsung, perubahan, dan dampak lanjutan. Dengan demikian, komponen analisis yang digunakan meliputi *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*.



**Gambar 2. 2 Kerangka *Logical Framework Analysis***  
 Sumber: Hasil adaptasi dari (Mclaughlin & Jordan, 1999)

**Tabel 2. 1 Dasar Teori dan Batasan Komponen *Logical Framework Analysis***

Komponen dalam Penelitian	Dasar Teori	Pengertian Teoritis	Batasan dalam Penelitian
<b>Input</b>	Mclaughlin & Jordan (1999) menjelaskan bahwa <i>logic model</i> menggambarkan hubungan antara <i>program resources</i> , <i>activities</i> , <i>output</i> , dan <i>outcome</i> . <i>Program resources/input</i> dipahami sebagai sumber daya yang mendukung jalannya program.	Sumber daya atau dukungan awal yang digunakan untuk menjalankan program.	Legalitas program, dukungan kelurahan, pelatihan, bantuan alat, rumah produksi, pendampingan, kerja sama pihak luar, keberadaan pengelola, serta potensi lokal bahan olahan.
<b>Output</b>	Mclaughlin & Jordan (1999) menjelaskan bahwa <i>output</i> adalah produk, barang, atau layanan yang diberikan kepada penerima langsung program.	Hasil langsung yang muncul dari pelaksanaan kegiatan program.	Produk olahan, kegiatan produksi yang berjalan, pemanfaatan rumah produksi, promosi kegiatan bazar/pasar, wisata edukasi, kelompok/pengelola aktif, dan kegiatan kolektif Kampung Tematik.
<b>Outcome</b>	Mclaughlin & Jordan (1999) menjelaskan bahwa <i>outcome</i> adalah perubahan atau manfaat yang dihasilkan dari kegiatan dan <i>output</i> program.	Perubahan yang muncul setelah <i>output</i> program berjalan.	Perubahan kapasitas pelaku/pengelola, kemandirian kegiatan, keterlibatan masyarakat, keterhubungan produk dengan pasar/promosi/wisata, kegiatan lebih terorganisir, dan

				perbedaan capaian antar kampung.
<b><i>Impact</i></b>	Mclaughlin & Jordan (1999) membedakan <i>outcome</i> jangka pendek, menengah, dan panjang; dampak program dapat dipahami sebagai hasil jangka panjang.	Dampak atau jangka panjang program.	lanjutan manfaat lebih dari	Tambahan pendapatan, perluasan pasar, penguatan identitas lokal, keberlanjutan produksi, regenerasi pelaku, lingkungan lebih tertata, dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

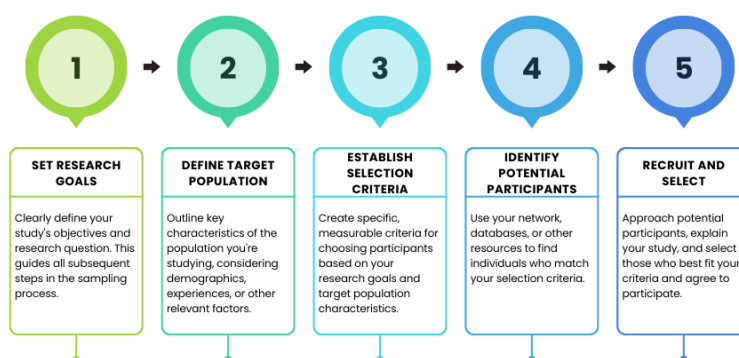
*Sumber: Hasil adaptasi dari (Mclaughlin & Jordan, 1999)*

Berdasarkan tabel tersebut, kerangka LFA dalam penelitian ini tidak digunakan dalam bentuk klasik secara penuh, tetapi diadaptasi dari *logic model* untuk menjelaskan alur kerja program. Sementara itu, prinsip LFA digunakan untuk menekankan hubungan logis antar komponen, indikator, serta sumber verifikasi. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini tidak disusun secara bebas, tetapi diturunkan dari teori evaluasi program dan disesuaikan dengan konteks Kampung Tematik berbasis olahan.

#### **2.1.2.4 Teknik Penentuan Informan melalui *Purposive Sampling***

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan tidak selalu dilakukan secara acak, tetapi dapat dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Teknik ini dikenal sebagai *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu karena informan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015; Robinson, 2014). Dengan demikian, informan dipilih bukan berdasarkan jumlah yang besar, melainkan berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan terhadap fokus penelitian (Suri, 2011).

# A 5-Step for Purposive Sampling Process



**BEST DISSERTATION WRITERS**

**Gambar 2. 3 Proses 5 Tahap Purposive Sampling Penelitian Kualitatif**

*Sumber: (Prime, 2024)*

*Purposive sampling* relevan digunakan dalam penelitian evaluasi program pemberdayaan masyarakat karena data yang dibutuhkan bersifat mendalam dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya membutuhkan informasi umum mengenai keberadaan Kampung Tematik, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai proses pelaksanaan program, bentuk dukungan kelembagaan, keterlibatan masyarakat, kegiatan UMKM, serta manfaat yang dirasakan oleh pelaku di lapangan. Oleh karena itu, informan dipilih dari pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan Program Kampung Tematik berbasis olahan (Moser & Korstjens, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan yang terdiri atas pihak kelurahan, pengelola Kampung Tematik, dan pelaku UMKM olahan. Pihak kelurahan dipilih karena memiliki peran dalam dukungan kebijakan, fasilitasi, dan pemantauan program. Pengelola Kampung Tematik dipilih karena memahami proses pengelolaan, kegiatan, capaian, dan kendala program. Sementara itu, pelaku UMKM olahan dipilih karena merupakan sasaran langsung program dan mengetahui manfaat, perubahan kapasitas, serta keberlanjutan kegiatan usaha. Dengan pemilihan informan tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* program secara lebih mendalam. Pemilihan informan yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung memungkinkan diperolehnya informasi yang kaya dan relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015).

Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data pada setiap komponen evaluasi. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung

dalam Program Kampung Tematik berbasis olahan, baik sebagai pihak kelurahan, pengelola kampung tematik, maupun pelaku UMKM. Melalui pemilihan informan tersebut, data yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan pelaksanaan program dari sisi dukungan kelembagaan, pengelolaan kegiatan, serta manfaat yang dirasakan oleh pelaku di lapangan. Dengan demikian, purposive sampling membantu penelitian ini memperoleh informasi yang relevan dengan komponen LFA, yaitu *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*, serta enam variabel pemberdayaan Masyarakat (Palinkas et al., 2015; Suri, 2011)

#### **2.1.2.5 Teknik Pengumpulan Data melalui Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)**

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali informasi secara lebih rinci dari informan. Teknik ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, pandangan, pengetahuan, serta penilaian informan terhadap suatu fenomena. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang bersifat kaku, wawancara mendalam memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan, sehingga data yang diperoleh dapat lebih kaya dan kontekstual (Rosaliza, 2015).

Dalam penelitian evaluasi program pemberdayaan masyarakat, wawancara mendalam relevan digunakan karena informasi yang dibutuhkan tidak hanya berupa data faktual mengenai keberadaan program, tetapi juga pengalaman pelaksanaan, bentuk keterlibatan masyarakat, dukungan kelembagaan, kendala program, serta manfaat yang dirasakan oleh pelaku di lapangan. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memahami bagaimana Program Kampung Tematik berbasis olahan dijalankan oleh aktor yang terlibat secara langsung.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data dari pihak kelurahan, pengelola Kampung Tematik, dan pelaku UMKM olahan. Pihak kelurahan diwawancarai untuk mengetahui dukungan kebijakan, fasilitasi, dan peran kelembagaan dalam program. Pengelola Kampung Tematik diwawancarai untuk memahami proses pengelolaan, kegiatan, capaian, dan kendala program. Sementara itu, pelaku UMKM diwawancarai untuk mengetahui manfaat program, perubahan kapasitas, keberlanjutan usaha, serta dampak ekonomi yang dirasakan. Data hasil wawancara kemudian digunakan untuk menganalisis komponen *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* dalam kerangka *Logical Framework Analysis*.

### 2.1.2.6 Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (*people centered development*), keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil fisik semata, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang dapat menggambarkan tingkat pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini disusun berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa jurnal internasional yang relevan. Ketiga jurnal tersebut memberikan perspektif yang berbeda mengenai dimensi-dimensi pemberdayaan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat mampu berperan aktif, mandiri, dan berkelanjutan dalam pembangunan.

Jurnal pertama, *Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in Development Planning*, menekankan pentingnya partisipasi, kapasitas kelembagaan, serta kemandirian komunitas dalam proses pemberdayaan. Jurnal ini juga menyoroti peran dukungan kebijakan dan pengetahuan lokal sebagai elemen penting keberlanjutan program. Adapun indikator-indikator yang dikemukakan dalam jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2 Indikator Pemberdayaan Masyarakat menurut Jurnal *Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in Development Planning***

No	Indicator (English)	Indikator (Indonesia)	Penjelasan
1	<i>Community participation</i>	Partisipasi masyarakat	Tingkat keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
2	<i>Institutional capacity</i>	Kapasitas kelembagaan lokal	Kekuatan lembaga masyarakat dalam mengelola dan mendukung kegiatan pemberdayaan.
3	<i>Community self-reliance</i>	Kemandirian komunitas	Kemampuan masyarakat menjalankan program tanpa ketergantungan pihak luar.
4	<i>Policy and institutional support</i>	Dukungan kebijakan dan koordinasi antar lembaga	Adanya dukungan pemerintah dan sinergi kelembagaan untuk keberlanjutan program.
5	<i>Local knowledge and contextual adaptation</i>	Pengetahuan dan adaptasi lokal	Pemanfaatan kearifan lokal dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Sumber: (Mustanir et al., 2025)

Selanjutnya, indikator pemberdayaan masyarakat dari jurnal *Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience* difokuskan pada aspek keberlanjutan dan ketahanan komunitas melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, serta aksi kolektif masyarakat. Indikator dari jurnal tersebut disajikan pada **Tabel 2.3** berikut.

**Tabel 2.3** Indikator Pemberdayaan Masyarakat menurut Jurnal *Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience*

No	Indicator (English)	Indikator (Indonesia)	Penjelasan
1	<i>Capacity building</i>	Peningkatan kapasitas	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, atau workshop.
2	<i>Collective action</i>	Aksi kolektif	Kerja sama dan tindakan bersama masyarakat dalam mencapai tujuan program.
3	<i>Ownership and self-reliance</i>	Kepemilikan dan kemandirian	Rasa memiliki dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan program secara mandiri.
4	<i>Local knowledge integration</i>	Integrasi pengetahuan lokal	Penerapan kearifan lokal dan nilai budaya dalam kegiatan pemberdayaan.
5	<i>Sustainability and resilience</i>	Keberlanjutan dan ketahanan	Kemampuan masyarakat menjaga hasil pemberdayaan serta beradaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi.
6	<i>Participatory evaluation</i>	Evaluasi partisipatif	Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Sumber: (Dushkova & Ivlieva, 2024)

Berdasarkan **Tabel 2.3**, pendekatan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada penguatan kapasitas dan ketahanan komunitas dalam jangka panjang. Sementara itu, jurnal *Community Empowerment: A Concept Analysis* meninjau pemberdayaan dari sisi konseptual dengan menekankan aspek penentuan diri, kapasitas pengambilan keputusan, serta akses terhadap sumber daya dan kesetaraan sosial. Indikator dari jurnal tersebut disajikan pada **Tabel 2.4** berikut.

**Tabel 2.4** Indikator Pemberdayaan Masyarakat Jurnal *Community Empowerment: A Concept Analysis*

No	Indicator (English)	Indikator (Indonesia)	Penjelasan
1	<i>Self-determination</i>	Penentuan diri	Kemampuan masyarakat menetapkan prioritas dan arah pembangunan sendiri.

No	Indicator (English)	Indikator (Indonesia)	Penjelasan
2	<i>Decision-making capacity</i>	Kapasitas pengambilan keputusan	Kemampuan masyarakat membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi mereka.
3	<i>Access to resources</i>	Akses terhadap sumber daya	Kesetaraan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi, modal, pendidikan, dan kesehatan.
4	<i>Social inclusion and equality</i>	Inklusi sosial dan kesetaraan	Pelibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
5	<i>Control over development process</i>	Kontrol terhadap proses pembangunan	Masyarakat memiliki kendali atas pelaksanaan dan hasil program.
6	<i>Critical awareness</i>	Kesadaran kritis	Kemampuan masyarakat memahami kondisi sosial yang menimbulkan ketimpangan dan berupaya memperbaikinya.

Sumber: (Kruahong et al., 2023)

### 2.1.3 Sintesis konsep teoritis

Kajian literatur yang telah dibahas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan strategi utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam menentukan arah pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Rappaport et al (1987), pemberdayaan adalah proses di mana individu dan komunitas memperoleh kendali terhadap kehidupannya melalui partisipasi dan kolaborasi sosial yang reflektif. Fetterman (1994, 2018) memperluas konsep ini melalui *Empowerment Evaluation*, yang menekankan bahwa evaluasi bukan hanya alat ukur kinerja, tetapi juga proses pembelajaran kolektif untuk memperkuat kapasitas komunitas. Sementara itu, Perkins & Zimmerman, (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup tiga dimensi saling terkait, yaitu *intrapersonal*, *interactional*, dan *behavioral empowerment*, yang berperan dalam membangun komunitas yang mandiri dan adaptif. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses sosial yang berorientasi pada perubahan struktural dan peningkatan kapasitas kolektif menuju kemandirian.

Proses pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap dan sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan refleksi (Fetterman, 2001). Setiap tahap berfungsi membangun kemampuan masyarakat untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan sumber daya lokal secara partisipatif. Patton (1997) menekankan bahwa setiap tahapan pemberdayaan perlu dirancang secara *utilization focused*, yakni menyesuaikan metode dan indikator dengan kebutuhan nyata masyarakat

agar hasilnya dapat langsung dimanfaatkan. Dengan demikian, proses pemberdayaan tidak hanya menekankan keberhasilan teknis, tetapi juga pembelajaran sosial yang berkelanjutan bagi komunitas.

Prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Chambers (1994) dan Kabeer (1999) menegaskan pentingnya kesetaraan, partisipasi, otonomi, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam pembangunan berbasis masyarakat. Prinsip tersebut menuntut perubahan paradigma dari pendekatan *top down* menjadi *bottom up*, di mana masyarakat menjadi pengambil keputusan utama dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam kerangka ini, pemberdayaan bukan sekadar transfer pengetahuan atau sumber daya, tetapi proses sosial yang mendorong masyarakat untuk memperoleh *agency*, kapasitas reflektif, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, prinsip pemberdayaan berperan sebagai panduan etis sekaligus metodologis untuk menciptakan perubahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi proses pembangunan. Rossi et al., (2003) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan sarana ilmiah untuk menilai hubungan logis antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil suatu program pembangunan. Fetterman, (1994) menegaskan bahwa evaluasi juga merupakan alat refleksi partisipatif yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai keberhasilan mereka sendiri. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai proses penguatan kapasitas sosial yang bersifat formatif dan sumatif, membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup sekaligus membangun sistem pembelajaran sosial yang berkelanjutan.

Sintesis teori-teori tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang efektif menuntut adanya integrasi antara partisipasi aktif, penguatan kelembagaan lokal, serta dukungan kebijakan dan evaluasi partisipatif yang berkelanjutan. Program pemberdayaan yang tidak disertai mekanisme reflektif berpotensi gagal mencapai tujuan karena tidak berakar pada kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian Kampung Tematik berbasis Olahan di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) digunakan untuk menilai keterkaitan tujuan program dan tingkat ketercapaian hasil pemberdayaan berdasarkan enam variabel utama. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang terukur sekaligus kontekstual terhadap dinamika sosial dan hasil nyata dari proses pemberdayaan di tingkat lokal.

#### 2.1.4 Sintesis Metoda, Variabel, dan Indikator Evaluasi

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA). LFA dipilih karena mampu mengintegrasikan antara logika perencanaan proyek dan nilai-nilai partisipatif yang ditekankan dalam teori pemberdayaan (Ortiz-marcos, 2022). Menurut S. Conlin et al., (2000), LFA berperan penting dalam menilai hubungan sebab-akibat antar komponen program secara sistematis. Dalam penelitian ini, *Logical Framework Analysis* (LFA) digunakan sebagai kerangka evaluasi program untuk menilai keterkaitan antara *input*, *proses* pelaksanaan, *output*, *outcome*, dan *impact*. Enam variabel keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipasi, kapasitas, kemandirian, dukungan kelembagaan, nilai lokal, dan keberlanjutan sosial ekonomi, digunakan sebagai indikator evaluatif dalam menganalisis capaian *outcome* dan *impact* program. Dengan demikian, LFA berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai sejauh mana proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Tematik berbasis Olahan telah berjalan secara efektif.

Sintesis teori pemberdayaan masyarakat yang telah dibahas menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas dan kemandirian komunitas, dukungan kelembagaan dan kebijakan, integrasi pengetahuan lokal, serta keberlanjutan sosial ekonomi (Chambers, 1994; Fetterman, 2001; Perkins & Zimmerman, 1995). Setiap variabel mencerminkan dimensi pemberdayaan yang saling berhubungan dan perlu dianalisis secara mendalam untuk melihat tingkat efektivitas program. Indikator-indikator keberhasilan disusun berdasarkan integrasi teori klasik empowerment dengan kerangka LFA, sehingga setiap aspek dapat diukur melalui kombinasi antara data kualitatif (persepsi, partisipasi, refleksi) dan data kontekstual (hasil program, dampak sosial). Oleh karena itu, LFA dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menilai efektivitas implementasi prinsip pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan terukur. Hubungan antara metode analisis, variabel, indikator, dan sumber teori disajikan dalam **Tabel 2.5** berikut.

**Tabel 2. 5 Sintesis Metoda, Variabel, dan Indikator Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat**

No	Variabel Evaluasi	Indikator Penilaian	Sumber Teori
1	Partisipasi masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan	(Fetterman, 1994; Laverack & Wallerstein, 2001)

No	Variabel Evaluasi	Indikator Penilaian	Sumber Teori
2	Kapasitas dan kemandirian komunitas	Kemampuan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, melaksanakan kegiatan secara mandiri, dan melanjutkan program tanpa ketergantungan pada pihak luar	(Lyons et al., 2001; Perkins & Zimmerman, 1995)
3	Kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan	Kekuatan organisasi lokal, dukungan pemerintah, CSR, dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga keberlanjutan program	Mustanir et al. (2025); Kruahong et al. (2023)
4	Integrasi pengetahuan dan nilai lokal	Penerapan kearifan lokal, nilai budaya, serta adaptasi terhadap konteks sosial ekonomi setempat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	(Lennon et al., 2019; Shiel et al., 2016)
5	Keberlanjutan dan ketahanan komunitas	Kemampuan masyarakat menjaga hasil pemberdayaan, mempertahankan kegiatan ekonomi, dan beradaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi	(Avelino, 2018; Lyons et al., 2001; Perkins & Zimmerman, 1995)
6	Penentuan diri dan pengambilan keputusan	Kemampuan masyarakat menentukan arah pembangunan, membuat keputusan bersama, dan memiliki kontrol terhadap proses program	(Avelino & Wittmayer, 2016; Zimmerman, 2000)

Sumber : Hasil sintesis dari Mustanir et al. (2025), Dushkova & Ivlieva (2024), dan Kruahong et al. (2023)

Berdasarkan sintesis pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tematik berbasis Olahan dievaluasi melalui enam variabel utama yang saling berkaitan, yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas dan kemandirian komunitas, dukungan kelembagaan dan kebijakan, integrasi pengetahuan lokal, keberlanjutan dan ketahanan komunitas, serta penentuan diri dan pengambilan keputusan. Keenam variabel tersebut menjadi dasar dalam penyusunan instrumen evaluasi menggunakan *Logical Framework Analysis* (LFA) untuk menilai ketercapaian tujuan program dan hasil pemberdayaan masyarakat berdasarkan enam variabel utama secara sistematis dan kontekstual.